



KOMUNIKA, P-ISSN [2615-112X], E-ISSN [2615-5206]  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/komunika>  
DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/komunika.v1i1.2759>  
Volume 1, No. 1, Juni 2018, halaman 71 – 86

## **PENDEKATAN PENYULUHAN PARTISIPATIF DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS BUDAYA LOKAL DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN KOTA AGUNG**

---

**Mansur Hidayat**

UIN Raden Intan Lampung  
[mansurhidayat@radenintan.ac.id](mailto:mansurhidayat@radenintan.ac.id)

---

**Abstract:** *In the perspective of social change based on the empowerment paradigm, development communication activities as a process of change are also carried out in a participatory manner. The process of participation and empowerment can be studied through awareness theory. a process of awareness to them about the circumstances of the environment, needs, desires, and abilities. The awareness process must be done through a dialogue process. While the process of dialogue is a continuous two-way communication process so as to find an understanding and understanding that form an awareness. This awareness will happen to the dialogue parties. Such parties can be individuals in the community as well as individuals in government institutions. Communication process is often referred to as a model of convergence communication. Implementation of participatory extension approach is the most appropriate approach to be used in the process of community empowerment, because besides it will naturally give rise to a collective awareness of the problem and its potential, it will also place the community as subject and responsible actors of change.*

**Abstrak:** *Dalam perspektif perubahan sosial yang berbasis pada paradigma pemberdayaan, kegiatan komunikasi pembangunan sebagai proses*

perubahan juga dilakukan secara partisipatif. Proses partisipasi dan pemberdayaan dapat dipelajari melalui teori kesadaran. suatu proses kesadaran kepada mereka tentang keadaan lingkungan, kebutuhan, keinginan, dan kemampuan. Proses penyadaran harus dilakukan melalui proses dialog. Sedangkan proses dialog adalah proses komunikasi dua arah yang berkesinambungan sehingga menemukan pemahaman dan pemahaman yang membentuk kesadaran. Kesadaran ini akan terjadi pada pihak-pihak dialog. Pihak-pihak tersebut dapat menjadi individu di masyarakat maupun individu di lembaga pemerintah. Proses komunikasi sering disebut sebagai model komunikasi konvergensi. Implementasi pendekatan penyuluhan partisipatif adalah pendekatan yang paling tepat untuk digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena selain itu secara alami akan menimbulkan kesadaran kolektif akan masalah dan potensinya, juga akan menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan pelaku tanggung jawab perubahan.

**Keywords:** *Empowerment, Culture, Communication*

## **A. Pendahuluan**

Upaya perubahan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di kawasan pedesaan yang selama ini diwacanakan dalam terminologi 'Pembangunan masyarakat desa', masih terus menjadi isu dan tema penting, terus menjadi wacana sosial-politik, dan secara politik nampaknya menjadi isu yang menarik. Tidak heran jika sepanjang usia negara Indonesia khususnya, pembangunan masyarakat desa terus mendapatkan perhatian dari pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah.

Upaya dan keinginan politik untuk membangun masyarakat desa sebenarnya menjadi tuntutan aktual bila memperhatikan beberapa realitas social-ekonomi masyarakat; *pertama*, Bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan dengan kondisi sosial ekonomi yang relatif tertinggal dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Dan wilayah Indonesia sendiri didominasi oleh wilayah perdesaan yang perkembangannya relatif lamban. *kedua*, kondisi sosial ekonomi pedesaan masih memprihatinkan, walaupun berbagai kebijakan dan program pembangunan masyarakat diarahkan pada pembangunan masyarakat desa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 29 - 30.

Masyarakat desa pada umumnya, sejatinya memiliki beragam potensi untuk dikembangkan baik berupa potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, dan yang seringkali diabaikan, atau paling tidak kurang mendapatkan perhatian adalah potensi sosial budaya yang masih sangat melekat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat desa. Potensi sosial budaya (atau secara spesifik disebut potensi kultural) merupakan karakteristik spesifik yang menjadi ciri eksklusif dari masyarakat pedesaan. Sumber daya sosial budaya menyimpan kekuatan sebagai instrumen perubahan masyarakat. Nilai-nilai kehidupan sosial budaya yang ada pada masyarakat pedesaan menjadi panduan kehidupan sosial dan menjadi energi penggerak aktifitas sosial dan ekonomi. Masyarakat pedesaan masih sangat terikat dengan nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh secara *indigenous* di tengah kehidupan pedesaan itu sendiri, dan tetap menjaganya sebagai kekayaan budaya masyarakat lokal. Norma norma sosial budaya yang berlaku pada masyarakat pedesaan merupakan modal sosial yang menjadi energi potensial penggerak kehidupan sosial ekonomi yang produktif. Kekayaan nilai-nilai kultural yang masih terjaga dengan baik dalam kehidupan masyarakat pedesaan sudah terbukti menjadi kekuatan budaya yang disamping menjaga stabilitas kehidupan individu dan sosial masyarakat desa, juga menjadi penggerak (dinamisator) kehidupan sosial budaya bahkan kehidupan ekonomi masyarakat desa. *Local Wisdom* yang menjadi energi sosial-ekonomi masyarakat pedesaan ini sebenarnya menyimpan kekuatan besar untuk di-*re-engineering* menjadi kekuatan social ekonomi, yang dapat menjadi *trigger* dari dinamika sosial, budaya bahkan ekonomi masyarakat desa.

Hanya saja pendekatan pembangunan yang selama beberapa dekade dijalankan lebih mengacu pada pendekatan sentralistik yang *top-down* dengan mengabaikan berbagai potensi lokal yang seyogyanya bisa berfungsi paling tidak untuk menjadi kekuatan social-budaya dalam pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan kehidupan bahkan ekonomi pedesaan. Pendekatan pembangunan yang dianggap gagal menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil mendorong upaya dan pemikiran untuk melahirkan konsep alternatif, pada tahun 90-an muncul konsep pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*) atau sering disebut dengan istilah pemberdayaan masyarakat (*community*

*empowerment*)<sup>2</sup>, yakni pemberdayaan yang didasarkan pada potensi wilayah sekitar masyarakat atau pemberdayaan berbasis potensi sumber daya lokal, yang tersedia atau digali dari wilayah setempat yang masih termasuk dalam batas geografis komunitas atau lingkungan sosialnya.<sup>3</sup> Baik sumber daya alam, sosial, dan budaya maupun sumber daya manusia.<sup>4</sup> Pemberdayaan berbasis sumberdaya lokal atau potensi lokal menjadi awal untuk mendorong partisipasi aktif dan kemandirian masyarakat serta pembangunan berkelanjutan.<sup>5</sup> Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan merumuskan program yang didesain untuk mengatasi masalah yang mereka alami.<sup>6</sup>

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat berbasis sumberdaya atau potensi lokal merupakan perubahan paradigma pembangunan masyarakat desa. Dimana paradigma pembangunan pada era orde baru yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan *top down* telah mengabaikan partisipasi dan potensi masyarakat lokal. Kebijakan, program, dan pelaksanaan pembangunan didesain oleh pemerintah sementara masyarakat hanya ditempatkan sebagai obyek, sehingga partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan wilayahnya sendiri bagaikan patamorgana, terlibat tapi tidak memiliki kebebasan berkreasi untuk memperjuangkan nasib mereka.

Sementara itu, paradigma pemberdayaan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melakukan rekayasa dalam mengelola sumberdaya yang tersedia pada wilayah dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.<sup>7</sup> Kemandirian yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi biasanya tumbuh dari kesadaran terhadap beberapa hal, diantaranya: *Pertama*, kondisi yang tidak

---

<sup>2</sup> *Community development* merupakan konsep alternative yang lahir sebagai antitesa dari konsep pembangunan yang dianggap gagal menciptakan kesejahteraan secara berkeadilan, lihat Mansour Fakih *Runtuhnya teori Pembangunan*,

<sup>3</sup> Aprillia Theresia dkk., *Pengembangan Berbasis Masyarakat Acuan bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 33

<sup>4</sup> Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 131-132

<sup>5</sup> *Ibid*,

<sup>6</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 61-62

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 80

memuaskan dan harus diperbaiki. *Kedua*, kondisi yang harus diperbaiki oleh kekuatannya sendiri. *Ketiga*, kemampuannya dalam berpartisipasi. *Keempat*, adanya kepercayaan bahwa ia mampu.<sup>8</sup>

Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa idealnya dilakukan dengan menerapkan prinsip partisipatif untuk menanamkan kepercayaan diri tentang potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa sendiri sebagai modal untuk melakukan perubahan keadaan yang bertumpu pada potensi yang dimiliki berupa; pengalaman, ketrampilan, dan potensi sosial lain terutama berupa nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat.

Paradigma perubahan sosial-budaya (pembangunan) masyarakat pedesaan yang mengedepankan kemampuan dan berbagai potensi lokal yang dimiliki atau ada dilingkungn kehidupan masyarakat desa itu sendiri merupakan sebuah pendekatan humanis yang diharapkan akan membuahkan hasil yang lebih optimal, berkesinambungan, disamping manusiawi (humanis) dan mempertimbangkan kelestarian budaya dan ekologi. Paradigma ini lebih dikenal dengan pendekatan pemberdayaan Masyarakat (*Community development*). Karakteristik yang menandai paradigm Pemberdayaan Masyarakat adalah mengedepankan potensi dan kapasitas masyarakat lokal yang dibangun dan ditumbuhkan melalui proses belajar sosial<sup>9</sup> yang dilakukan masyarakat secara berkesinambungan. Tentu saja paradigma ini secara niscaya memerlukan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan masalah yang dihadapi serta potensi dan kapasitas yang dapat dioptimalkan dan dikembangkan baik untuk mengatasi masalah yang dihadapi serta dan selanjutnya mengembangkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di segala bidang.

Pendekatan pembangunan yang selama ini dijalankan lebih mengedepankan intervensi pemerintah dengan memposisikan masyarakat semata-mata sebagai objek yang seakan-akan tak berdaya, tidak memiliki sumber daya apapun yang bias dimanfaatkan untuk melakukan perubahan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 82

<sup>9</sup> Proses belajar social dalam hal ini bisa difahami sebagai proses panjang yang diusahakan masyarakat untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapi dan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Proses ini terintegrasi dengan dinamika masyarakat dalam melakukan respon terhadap kondisi lingkungannya baik lingkungan alam maupun lingkungan social, serta respon masyarakat terhadap perubahan perubahan dan perkembangan yang merupakan keniscayaan, lihat Soetomo, kesejahteraan dan Upaya mewujudkannya dalam Perspektif masyarakat Lokal, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014), h. 120

kehidupan mereka sendiri. Realitas kegiatan penyuluhan pembangunan yang dilakukan juga bila dicermati banyak dilakukan dengan pendekatan penyuluhan yang konvensional, yang ditandai oleh pola komunikasi yang *one-way communication*. Penyuluh sebagai komunikator dalam konteks ini menempatkan dirinya sebagai sumber informasi yang tunggal. Masyarakat sasaran penyuluhan (*audience*) semata-mata ditempatkan sebagai objek penyuluhan, yang dipaksa untuk menerima dan mengimplementasikan informasi yang diperlukan dalam penyuluhan. Realitas itu juga yang terjadi dalam program-program pembangunan yang dilaksanakan di desa atau Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten tenggamus. Dari hasil observasi sementara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa ini secara ekonomi khususnya masih berada pada tingkatan yang belum mandiri dan tingkat partisipasinya tergolong rendah.

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal yang dikemas dalam proyek-proyek pemberdayaan yang selama ini diimplementasikan oleh pemerintah dalam bentuk PNPM Mandiri, dan berbagai kemas sebelum dan sesudahnya belum membuahkan hasil yang memadai, proyek-proyek itu lebih banyak diorientasikan untuk perwujudan sarana fisik dan kurang menyentuh pada upaya perwujudan kemandirian masyarakat lokal dalam melakukan perubahan kondisi kehidupan yang mereka alami secara berkelanjutan. Potensi-potensi lokal yang ada nampak belum disadari oleh masyarakat sendiri sehingga belum bisa dioptimalkan dalam mengembangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Parameter kemajuan desa Nampak masih memakai standar kemajuan fisik-material yang terkesan diwujudkan secara instan. Pasca digulirkannya dana desa Nampak ada percepatan pembangunan sarana-sarana fisik seperti jalan-jalan desa, akan tetapi jika diperhatikan prioritas program belum mengarah pada perwujudan kemandirian masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang bertumpu pada potensi-potensi yang ada baik potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan potensi Sumber Daya Sosial-budaya yang masih terus hidup dan memberikan pengaruh social yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat desa.

Berangkat dari fakta-fakta diatas, maka untuk mewujudkan perubahan masyarakat yang dilakukan dengan pendekatan pembangunan kegiatan ini ditujukan untuk melakukan perubahan pada masyarakat dengan jalan menumbuhkan kesadaran akan potensi yang pada desa mereka dan

mengoptimalkan potensi itu untuk dikelola dalam serangkaian program pembangunan yang mengoptimalkan berbagai sumberdaya yang mereka miliki. Program ini bertumpu pada kegiatan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran dan kekuatan besar yang dimiliki masyarakat terutama potensi berupa modal sosial yang bersumber dari penganutan budaya lokal (dalam hal ini budaya Lampung Pesisir).

## **B. Potensi Budaya Lokal Pada Masyarakat Sasaran**

Proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang memposisikan unsur manusia dan masyarakat dalam proses produksi dan proses sosio-kultural atau sosial budaya tidak bisa dilepaskan dari tiga hal; yakni kepemimpinan, ideologi dan kelembagaan.

Pekon Kampung Baru, sebagai bagian dari pemerintahan menghimpun sejumlah anggota masyarakat dengan berbagai karakteristik dan segmen masyarakat, dimana masing-masing segmen memiliki kecenderungan digerakkan oleh otoritas sub-sistem kepemimpinan sejalan dengan dinamika dan kebutuhan internal sub-sistem social yang ada. Secara administratif, Pekon Kampung Baru memiliki struktur pemerintahan pekon yang diangkat melalui pemilihan langsung oleh, dari, dan untuk masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah Kabupaten (Bupati), sedangkan aparat yang ada di bawahnya ditunjuk oleh *Badan HIPPUN Pemekonan* (BHP). Kepala Pekon dipilih secara langsung oleh masyarakat. Sedangkan, struktur di bawahnya selain Sekretaris Pekon (PNS) ditunjuk oleh BHP berdasarkan musyawarah anggota. BHP merupakan utusan dari 4 (empat) kelompok adat yang ada di Pekon Kampung Baru dianggap mampu dan cakap mengemban tugas yang diamanatkan kepada mereka. Kelompok adat tersebut terdiri dari kelompok adat Pariyaman, Banjar Agung, Parada Suka, dan Penyandingan. Sementara itu, untuk mengorganisir kegiatan para pemuda, Pekon Kampung Baru memiliki 2 (dua) organisasi, yakni *Karang Taruna* di bawah binaan Kepala Pekon dan *Kelompok Muli Makhanai* (bujang gadis) di bawah binaan kelompok adat. Adanya dua organisasi pemuda diatas bukan mengindikasikan adanya dualisme organisasi pemuda, namun lebih pada upaya mengorganisir para pemuda secara proporsional sejalan dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Organisasi Karang Taruna lebih pada posisi sebagai institusi yang mengorganisir para pemuda dalam wadah kegiatan yang bersifat umum, sementara Organisasi *Muli Mekhanai* terkesan sebagai wadah kegiatan pemuda yang bernuansa kultural yang

menghimpun dan mengorganisir para pemuda dalam mengelola kegiatan yang bernuansa kultural Lampung.

Dalam hal system kepemimpinan, Sistem kepemimpinan pada masing-masing institusi kemasyarakatan yang ada agaknya tetap merujuk kepada pola dan system kepemimpinan kultural. Meski dalam beberapa hal merujuk kepada pola dan system politik modern (seperti pemilihan pimpinan secara demokratis dll), tetapi kepemimpinan adat tetap menjadi rujukan. Dalam hal mekanisme penentuan pimpinan institusi system demokrasi modern telah menjadi model yang direkrut oleh hampir semua institusi yang ada di tengah masyarakat, kecuali organisasi adat yang sudah memiliki system rekrutmen yang baku. Disamping sumber daya sosial dalam wujud system kepemimpinan juga terdapat sumber daya sosial yang berwujud ideologi. Ideologi yang dimaksud disini adalah nilai-nilai yang dianut masyarakat yang bisa menjadi dorongan internal (*inner dynamic*), system motivasi yang mampu menggerakkan dan mendorong terwujudnya tindakan dan perilaku untuk mewujudkan dinamika social-ekonomi, baik pada tataran pribadi maupun pada tataran kolektif, Ideologi social yang terdapat pada masyarakat Pekon Kampung Baru bisa diidentifikasi sebagai berikut:

*Pertama*, Nilai-nilai sosial yang mendorong bahkan memaksa penganutnya untuk selalu berpartisipasi. Prinsip partisipasi yang lestari adalah partisipasi yang dimotivasi oleh kesadaran internal untuk mewujudkan tindakan sosial. Gotong royong dan musyawarah sebagai ciri atau karakteristik budaya masyarakat menjadi akar setiap aktivitas dalam melaksanakan program pemerintahan dan masyarakat pekon. Setiap kegiatan pekon direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama antara aparat pekon, Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) dan masyarakat masyarakat, bahkan mendapatkan kritikan-kritikan. Misalnya: (a) penyaluran air bersih yang mengalir 24 jam di Pekon Kampung Baru; (b) pembangunan jalan pekon yang menghubungkan antara pekon induk dengan pusat perkantoran Pemerintahan Kabupaten Tanggamus; (c) proses perencanaan dan pembentukan panitia pembangunan masjid dan musholla; (d) sekarang ini sedang melaksanakan pembuatan talut dari jalan raya menuju parkir pariwisata air terjun Way Lalaan. Kesemuanya merupakan inisiatif masyarakat, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya yang disetujui dalam musyawarah pekon yang dilaksanakan setelah selesai melaksanakan sholat 'idul Fitri atau 'idul Adha.



*Kedua*, Perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan merupakan bagian esensial dari budaya masyarakat, mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan kebutuhan yang mendesak. Jika melihat data tingkat pendidikan masyarakat, perubahan pengetahuan masyarakat Pekon Kampung Baru dapat dilihat dari jumlah penduduk yang berpendidikan SMA sampai Perguruan Tinggi (PT) berjumlah 619 orang, yang terdiri dari SMA berjumlah 450 orang, D-1 s.d. D-3 berjumlah 144 orang, dan PT berjumlah 25 orang. Sedangkan yang berpendidikan SMP berjumlah 650 orang dan SD berjumlah 650 orang.<sup>10</sup>

Data tersebut menunjukkan ada perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada masyarakat. Dengan banyaknya anak muda yang menempuh pendidikan sampai kejenjang pendidikan tinggi, banyak perubahan yang terjadi di Pekon Kampung Baru, diantaranya: (a) semakin banyak anak usia sekolah yang melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi agar lebih cerdas, memiliki intelektualitas, berfikiran luas, dan tidak kuno; (b) semula bersikap tertutup berubah menjadi lebih terbuka dalam menerima perubahan dan pendapat orang lain. Pola usaha dari pertanian padi atau perkebunan yang bersifat semester atau tahunan berubah menjadi pola usaha bulanan, seperti palawija bahkan jasa. Perubahan pengetahuan juga tercermin pada perubahan pola hidup yang berhubungan dengan pola hidup sehat. Dibandingkan dengan pada masa lalu kini mayoritas rumah penduduk memiliki jamban keluarga (WC) yang berakibat pada kehidupan keluarga yang lebih sehat; (c) masyarakat memiliki keterampilan yang cukup beragam, diantaranya SMA umum, SMEA akutansi dan keuangan, STM mesin dan listrik, sarjana computer, sarjana pertanian, sarjana agama, dan Pendidikan Guru.

*Ketiga*, Perubahan struktural dalam hal ini dari ikatan social yang bersifat komunal ke asosiasional. Pekon Kampung Baru memiliki sejumlah asosiasi, baik yang bersifat organisasi pemerintahan pekon, seperti; Badan HIPPUN Pemekonan (BHP); Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), 2 Posyandu Balita dan 1 Posyandu Lansia maupun organisasi kemasyarakatan, seperti; 16 kelompok tani, 1 RISMA dan Karang Taruna, 6 Majelis Taklim Perempuan dan 1 Majelis Taklim Pria.

---

<sup>10</sup> Profil Pekon Kampung Baru tahun 2015, h. 4, *Dokumentasi*, dicatat pada Tanggal 11 Oktober 2015

### C. Penyuluhan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Berbeda dengan pendekatan ‘pembangunan’ yang *top-down*, pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*)<sup>11</sup>, pendekatan ‘pemberdayaan’ secara teoritik didasarkan pada potensi wilayah sekitar masyarakat atau pemberdayaan berbasis potensi sumber daya lokal. Sumberdaya lokal sendiri sejatinya adalah sumberdaya yang tersedia atau digali dari wilayah setempat yang masih termasuk dalam batas geografis komunitas atau lingkungan sosialnya.<sup>12</sup> Baik sumber daya alam, sosial, dan budaya maupun sumber daya manusia.<sup>13</sup> Pemberdayaan berbasis sumberdaya lokal atau potensi lokal menjadi awal untuk mendorong partisipasi aktif dan kemandirian masyarakat serta pembangunan berkelanjutan.<sup>14</sup> Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan merumuskan program yang didesain untuk mengatasi masalah yang mereka alami.<sup>15</sup>

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat berbasis sumberdaya atau potensi lokal merupakan perubahan paradigma pembangunan masyarakat desa. Dimana paradigma pembangunan pada era orde baru yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan *top down* telah mengabaikan partisipasi dan potensi masyarakat lokal. Kebijakan, program, dan pelaksanaan pembangunan didesain oleh pemerintah sementara masyarakat hanya ditempatkan sebagai obyek, sehingga partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan wilayahnya sendiri bagaikan patamorgana, terlibat tapi tidak memiliki kebebasan berkreasi untuk memperjuangkan nasib mereka. Sementara paradigma pemberdayaan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melakukan rekayasa dalam mengelola sumberdaya yang tersedia pada wilayah dan lingkungannya secara mandiri dan

---

<sup>11</sup> *Community development* merupakan konsep alternative yang lahir sebagai antitesa dari konsep pembangunan yang dianggap gagal menciptakan kesejahteraan secara berkeadilan, lihat Mansour Fakih *Runtuhnya teori Pembangunan*,

<sup>12</sup> Aprillia Theresia dkk., *Pengembangan Berbasis Masyarakat Acuan bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 33

<sup>13</sup> Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 131-132

<sup>14</sup> *Ibid*,

<sup>15</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 61-62

berkelanjutan.<sup>16</sup> Kemandirian yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi biasanya tumbuh dari kesadaran terhadap beberapa hal, diantaranya: *Pertama*, kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki. *Kedua*, kondisi yang harus diperbaiki oleh kekuatannya sendiri. *Ketiga*, kemampuannya dalam berpartisipasi. *Keempat*, adanya kepercayaan bahwa ia mampu.<sup>17</sup>

Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa idealnya dilakukan dengan menerapkan prinsip partisipatif untuk menanamkan kepercayaan diri tentang potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa sendiri sebagai modal untuk melakukan perubahan keadaan yang bertumpu pada potensi yang dimiliki berupa; pengalaman, ketrampilan, dan potensi sosial lain terutama berupa nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat.

Paradigma perubahan sosial-budaya (pembangunan) masyarakat pedesaan yang mengedepankan kemampuan dan berbagai potensi lokal yang dimiliki atau ada dilingkungn kehidupan masyarakat desa itu sendiri merupakan sebuah pendekatan humanis yang diharapkan akan membuahkan hasil yang lebih optimal, berkesinambungan, disamping manusiawi (humanis) dan mempertimbangkan kelestarian budaya dan ekologi. Karakteristik yang menandai paradig Pembdayaan Masyarakat adalah mengedepankan potensi dan kapasitas masyarakat lokal yang dibangun dan ditumbuhkan melalui proses belajar sosial<sup>18</sup> yang dilakukan masyarakat secara berkesinambungan. Tentu saja paradigma ini secara niscaya memerlukan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan masalah yang dihadapi serta potensi dan kapasitas yang dapat dioptimalkan dan dikembangkan baik untuk mengatasi masalah yang dihadapi serta dan selanjutnya mengembangkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di segala bidang.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 80

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 82

<sup>18</sup> Proses belajar social dalam hal ini bisa difahami sebagai proses panjang yang diusahakan masyarakat untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapi dan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Proses ini terintegrasi dengan dinamika masyarakat dalam melakukan respon terhadap kondisi lingkungannya baik lingkungan alam maupun lingkungan social, serta respon masyarakat terhadap perubahan perubahan dan perkembangan yang merupakan keniscayaan, lihat Soetomo, kesejahteraan dan Upaya mewujudkannya dalam Perspektif masyarakat Lokal, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014), h. 120

Dalam perspektif perubahan sosial berparadigma pemberdayaan, maka kegiatan komunikasi pembangunan sebagai proses perubahan juga dilakukan secara partisipatif. Proses partisipasi dan pemberdayaan tersebut dapat dikaji melalui teori penyadaran. Teori Penyadaran ini dikemukakan oleh Freire (1984), Dalam teori ini pokok perhatian ditujukan kepada individu manusia, dimana manusia merupakan bundel ide-ide kesadaran, tujuan-tujuan hidup, rasa takut, frustrasi, benci, cinta, kebiasaan, perasaan yang mendalam, kebanggaan dan prasangka. Menurut Freire, menjadi manusia berarti menjalin hubungan dengan sesama dan dengan dunia sekitarnya sebagai realitas objektif yang tidak tergantung kepada siapa pun. Integrasi dengan lingkungan berbeda dengan adaptasi, untuk itu dia mengatakan, "seseorang tidaklah utuh bila dia kehilangan kemampuan memilih, bila pilihannya adalah pilihan orang lain, dan bila keputusan keputusannya berasal dari luar dan bukan merupakan keputusan sendiri". Integrasi muncul dari kemampuan menyesuaikan diri dengan realitas, ditambah kemampuan kritis membuat pilihan dan mengubah realitas. Selanjutnya, manusia yang utuh adalah manusia sebagai subyek, sedangkan manusia yang beradaptasi adalah manusia sebagai obyek. Dengan demikian, adaptasi merupakan bentuk pertahanan diri yang paling rapuh. Seseorang beradaptasi karena dia tidak mampu mengubah realitas. Manusia memainkan peranan yang menentukan dalam perwujudan dan penggantian kurun sejarah, bagaimana mereka menangani realitas yang melahirkan tema-tema jamannya. Hal tersebut akan sangat menentukan apakah mereka mengalami pengukuhan sebagai subyek atau humanisasi atautah dehumanisasi yaitu kemerosotan sebagai obyek.

Refleksi terhadap pandangan Freire bila ditarik untuk menemukan pola dan pendekatan perubahan masyarakat dalam konteks ini akan membawa kita pada pemikiran bahwa pemberdayaan individu masyarakat dapat dilakukan melalui proses penyadaran pada mereka terhadap situasi dan kondisi lingkungan, kebutuhan, keinginan, dan kemampuan. Proses penyadaran tersebut harus dilakukan melalui proses dialog. Sedangkan proses dialog merupakan proses komunikasi dua arah yang berkelanjutan sehingga menemukan suatu pemahaman dan pengertian yang membentuk suatu kesadaran. Kesadaran ini akan terjadi pada pihak-pihak yang berdialog. Pihak-pihak tersebut bisa individu dalam masyarakat maupun individu pada lembaga pemerintahan. Proses komunikasi tersebut sering disebut sebagai model komunikasi konvergensi.

Dalam proses ini setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan selalu dalam proses komunikasi dua arah dan selalu melakukan dialog dengan pihak lain. Dapat dikatakan bahwa proses komunikasi merupakan proses peredaran darah dalam tubuh pembangunan, di mana darah tersebut berupa informasi atau pesan-pesan pembangunan. Dengan lancarnya proses peredaran darah informasi tersebut, dalam konteks teori penyadaran, diharapkan akan terwujud kesadaran pada semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi pembangunan yang sehat, dari pihak-pihak dalam pemerintahan hingga pihak-pihak dalam masyarakat. Kondisi tersebut akan mengantar kita ke pintu gerbang masyarakat yang sehat, masyarakat madani yang dicita-citakan oleh semua individu yang menyadari fitrahnya sebagai manusia.

Penyuluhan partisipatif merupakan pendekatan penyuluhan dari bawah ke atas (*bottom up*) untuk memberikan kekuasaan kepada masyarakat agar dapat mandiri, yaitu kekuasaan dalam peran, keahlian, dan sumberdaya untuk mengkaji desanya sehingga tergali potensi yang terkandung, yang dapat diaktualkan, termasuk permasalahan yang ditemukan.

Dalam prakteknya penyuluhan partisipatif memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara interaktif, analisis-*analisis* dibuat secara bersama yang akhirnya membawa kepada suatu rencana tindakan. Partisipasi disini menggunakan proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur melibatkan metode-metode multidisiplin, dalam hal ini kelompok ikut mengontrol keputusan lokal. Dalam konteks ini para penyuluh menanamkan motivasi untuk menggali keberadaan sumber informasi pembangunan masyarakat setempat yang mudah diakses oleh yang memerlukan, baik oleh penyuluh maupun masyarakat.

Dalam kegiatan pemberdayaan berbasis potensi budaya lokal ini metode Penyuluhan partisipatif telah dipergunakan, sebagai pendekatan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat adat tentang nilai-nilai budaya yang mereka miliki, yang dalam kehidupan masyarakat fungsinya semakin terbatas.

Masyarakat dalam kegiatan penyuluhan diposisikan sebagai subjek yang secara kolektif membedah potensi-potensi budaya lokal yang mereka anut, menggali dan merumuskan makna aktual dari budaya lokal dalam konteks pengembangan kehidupan masyarakat desa disegala bidang, terutama dalam kehidupan social-ekonomi. Penyuluh (dalam hal ini dosen pengabdian) dalam kegiatan penyuluhan ini hanya menempatkan diri sebagai

fasilitator yang memfasilitasi jalannya dialog, membuka jalan dengan memberikan stimulant pemikiran untuk mengarahkan dialog menuju tujuan yang telah disepakati. Dengan pendekatan partisipatif ini maka masyarakat (dalam hal ini masyarakat adat) memperlakukan diri mereka sebagai aktor pemberdayaan dalam posisi yang setara. Penyuluh dalam kegiatan ini memang tidak menempatkan diri sebagai narasumber yang secara structural seakan memiliki posisi yang lebih penting daln lebih tinggi dari masyarakat peserta dialog.

Dengan demikian maka seperti menurut Freire, sebagai subjek maka masyarakat yang menjadi peserta dialog memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan arah perubahan yang dikehendaki serta memilih sumber-sumber perubahan dari potensi yang tersedia. Proses komunikasi dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan dalam dua arah memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara interaktif, analisis-analisis dibuat secara bersama yang akhirnya membawa kepada suatu rencana tindakan. Partisipasi disini menggunakan proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur melibatkan metode-metode multidisiplin, dalam hal ini kelompok ikut mengontrol keputusan lokal.

#### **D. Penutup**

Perubahan sosial ber-paradigma pemberdayaan mengharuskan pilihan pendekatan penyuluhan yang tidak menempatkan masyarakat sebagai objek yang tidak berdaya, yang hanya menyerahkan arah dan pendekatan perubahan kepada pihak luar yang sebenarnya kurang berhubungan dengan arah kehidupan mereka. Dengan demikian maka pendekatan penyuluhan partisipatif adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Pendekatan penyuluhan partisipatif dalam impelementasinya menempatkan masyarakat sebagai subjek perubahan dengan menggali sumber-sumber informasi yang mereka miliki untuk didialogkan guna melahirkan keputusan kolektif yang berhubungan dengan kehidupan bersama. Analisis-analisis dalam proses 'penyadaran' kolektif dilakukan bersama yang pada akhirnya melahirkan rencana tindakan (rencana aksi) guna mewujudkan perubahan yang diinginkan. [ ]

## Daftar Pustaka

- Aprillia Theresia dkk., *Pengembangan Berbasis Masyarakat Acuan bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Pemikiran tentang Tiori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, sebagaimana dikutip oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko S dalam *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Nat J Colleta dan Umar Kayam, *Kebudayaan dan Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Obor, 1985.
- Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sartono Kartodiharjo, *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1987.
- Soetomo, *Keswadayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- , *Pembangunan Masyarakat merangkai sebuah kerangka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sofyan Effendi dkk., *Membangun Martabat Manusia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Sudarmayanti, *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Suparjan, *Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Aditya Media, 2003.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2012.